

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program kebijakan beras untuk Rumah tangga miskin (Raskin) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin),

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan sejak pelita pertama Tahun 1969 dan telah menjangkau keseluruhan pelosok tanah air. Upaya tersebut menghasilkan perkembangan yang signifikan yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi yang di pacu pada tingkat rata-rata 5 sampai 7 % per tahun, menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan yang sangat berarti. Berdasarkan laporan resmi pemerintah jumlah penduduk miskin tahun 1970 adalah 15% dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan tahun 1990 penduduk miskin Indonesia 13% dari keseluruhan jumlah penduduk atau mengalami penurunan sebesar 2% (BPS,1991)

Dari data (BPS, 2009) Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ketahun.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang.

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009. Nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

- a. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
- b. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80) dari laju inflasi.
- c. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan selama

Subround I (Januari-April 2008) terjadi panen raya. Secara lebih jelas adalah. Selama *Subround I* (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi *Subround I* 2009 mencapai 28,13 juta ton GKG, naik sekitar 0,05 persen dari produksi padi *Subround I* 2008 yang sebesar 28,11 juta tonGKG (hasil Angka Ramalan I 2009). Selama periode 2009 produksi jagung mencapai 16,48 juta ton (Angka Ramalan), meningkat 0,95 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 16,32 juta ton. Sementara produksi kedelai meningkat sebesar 9,5 persen dari 0,78 juta ton pada tahun 2008 menjadi 0,85 juta ton (Angka Ramalan) pada tahun 2009.

- d. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan naik sebesar 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman pangan indeks harga jual petani (It) naik sebesar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 persen. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementara indeks beli petani (Ib) hanya naik sebesar 9,70 persen.

Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp182.636,- per kapita perbulan pada Maret 2008 menjadi Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2008, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, tetapi pada Bulan Maret 2009, peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.

Pola yang serupa juga terlihat pada bulan Maret 2009. Pengeluaran untuk beras masih memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Beberapa barang-barang kebutuhan pokok lainnya masih berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, seperti gula pasir (2,83 persen di perkotaan; 3,72 di perdesaan), telur (3,61persen diperkotaan; 2,68 di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan; 2,70

di perdesaan), tempe (2,47 di perkotaan; 2,09 di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan; 1,60 persen di perdesaan). Sumbangan komoditi bukan makanan di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan. Sumbangan komoditi bukan makanan terhadap Garis Kemiskinan terbesar adalah pengeluaran untuk rumah, yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan.

Sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009, dan dilanjutkan peraturan presiden no 5 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, disebutkan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditetapkan 5 (lima) sasaran pokok salah satu agenda yaitu, pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya penduduk miskin hingga 8,25% pada tahun 2010. Untuk menunjukkan amanah nasional tersebut, pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan guna mendukung tercapainya target yang dimaksud.

Berdasarkan program kerja pemerintah (RKP) tahun 2006 kebijakan penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui strategi yang

mencakup 2 hal pokok, *Pertama*. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin dan *kedua* meningkatkan efektivitas pelayanan sosial dasar kepada keluarga miskin. Sejalan dengan strategi tersebut salah satu prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2006 yang diteruskan pada RPJM Nasional 2010-2014 diletakan pada upaya pokok perlindungan sosial kepada keluarga miskin dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Dalam Buku II RPJM N. 2010-2014).

Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok kelurga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan transfer energy dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainya seperti perbaikan gizi, peningkatakan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Tujuan program Raskin adalah memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin gizi makro masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan dan pokok, sebagai upaya peningkatan ketahan pangan melalui penjualan

beras pada tingkat harga besubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Pelaksana distribusi adalah aparat desa/kelurahan yang di bantu oleh warga setempat (kader KB, tim pengerak PKK, karang Taruna atau unsur masyarakat lain) dan ditunjukkan oleh kepala desa/lurah.

Keluarga sasaran penerima manfaat Raskin adalah keluarga miskin di desa/kelurahan yang berhak menerima beras raskin, sebagai hasil seleksi berdasarkan musyawarah desa/kelurahan menggunakan referensi dasar data BKKBN (keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi) ditetapkan oleh kepala desa/kelurahan dan disahkan oleh camat setempat (Depdagri,2005:2)

Studi implementasi kebijakan yang komprehensif merupakan kebutuhan mutlak bagi institusi pemerintah yang ingin menyukseskan dan mencapai keberhasilan program-perogramnya. Tapi apakah program raskin ini benar-benar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya dan apakah program raskin ini benar – benar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk dan instruksi pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan? Karena dalam faktanya di lapangan banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan raskin ini dan ada juga masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan raskin ini tetapi mendapatkan beras raskin ini. Ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan dari petugas pendata RTM

dalam mengkategorikan dan menafsirkan kriteria seseorang apakah orang tersebut termasuk miskin atau tidak, hal ini diperparah oleh adanya beberapa orang yang mengaku miskin ketika didata oleh petugas namun dalam kenyataannya orang tersebut hidup berkecukupan. Dalam proses penyampaian program juga banyak kelemahannya ini dikarenakan kurangnya kemampuan petugas, kurangnya sarana komunikasi yang dipergunakan oleh petugas, ditambah faktor media yang digunakan dalam proses penyampaian program yang kurang beragam yang menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Banyak juga ditemukan masyarakat miskin yang mendapatkan beras raskin menjual kembali berasnya kepada orang lain, dikarenakan adanya beberapa sebab diantaranya orang yang menerima beras tersebut tergolong kriteria orang yang mampu tetapi tetap terdata oleh petugas sehingga mungkin orang tersebut tidak membutuhkan beras tersebut, ada juga orang yang menjual beras tersebut untuk dibelikan bahan pokok lainnya dan ada juga yang menjual beras tersebut karena rendahnya kualitas beras raskin tersebut.

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Ada empat masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga

miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh *human error*, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya.

Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah raskin yang dijual kepada masyarakat (miskin) sudah pasti berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras yang diterima tak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan raskin kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon. (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS (Badan Pusat statistik) hanya 5,7–8,9 kg per bulan. Jumlah tersebut masing-masing hanya mencapai 65%–78% dan <http://www.ppk.or.id/downloads/EfektivitasPelaksanaanRaskin.pdf>).

Permasalahan ketiga, berhubungan dengan masalah sebelumnya, yakni disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya. sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada

kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah. penargetan merupakan poin utama kelemahan program Raskin karena tidak seluruh rumah tangga miskin menerima beras Raskin dan banyak rumah tangga tidak miskin yang menerimanya. yakni beras Raskin diterima oleh semua kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan (kuantil pengeluaran rumah tangga per kapita). Keempat, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidakterediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan (<http://newspaper.pikiran-rakyat.com>)

Di Kabupaten Bantul jumlah Kepala Keluarga miskin (KK pra Sejahtera alasan Ekonomi) jika pada tahun 2008 mencapai 64 ribu KK, tahun 2010 hanya 47 ribu KK target Pagu Beras sebanyak 7.278.648 (Kg). Pelaksanaan program Raskin tahun 2010 setiap rumah tangga sasaran Penerima manfaat (RTS-PM) akan menerima beras sebanyak Rp. 156Kg/RTS-PM/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,-/Kg netto di titik distribusi, dan akan disalurkan kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/bulan dengan durasi 10 bulan (Januari s/d Oktober), sedangkan satu bulan

terakhir (November) akan diterimakan sebanyak 6 Kg/RTS-PM. (BPPM D.I.Y, 2010).

Peraturan Bupati Bantul No. 18 Tahun 2005, Tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul. . Tujuan umum Diperolehnya data basis keluarga yang dapat memberikan gambaran ciri-ciri keluarga miskin yang dapat digunakan untuk penentuan prioritas sasaran berbagai intervensi pembangunan dalam rangka pengatasan kemiskinan, khususnya pasca gempa di Kabupaten Bantul. Tujuan Khusus. tersedianya data tentang nama kepala keluarga, jumlah jiwa dalam keluarga serta indikator penentu, penyebab dan pendukung kemiskinan. Ada beberapa aspek penentuan pendataan masyarakat yang menerima program beras miskin. Yaitu:

Table 1.1

Indikator keluarga miskin Babupaten Bantul

No	ASPEKKEMISKINAN	INDIKATOR KEMISKINAN
1	Aspek penyebab/aspek penghasilan	1. Jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas
2	Aspek penentuan kemiskinan	1. Aspek pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali sehari) 2. Aspek sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal enam

		<p>stel)</p> <p>3. Aspek papan (tempat tinggal/ rumah berlantai tanah/ berdinding bambu/berataprumbia)</p>
3	Aspek pendukung kemiskinan	<p>1. Aspek kesehatan (bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar)</p> <p>2. Aspek pendidikan (keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 – 15 th)</p> <p>3. Aspek kekayaan jumlah kekayaan/aset milik keluarga</p> <p>4. Aspek air bersih (tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan, minum & MCK)</p> <p>5. Aspek listrik (tidak menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga)</p> <p>6. Jumlah anggota/ jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih.</p>

lampiran peraturan bupati bantul No: 21 a Tahun 2007 tanggal 1 April 2007 dalam peraturan bupati No:18 tahun 2005

Di Desa Banguntapan sendiri bisa dilihat dari hasil rekapitulasi hasil validitasi keluarga miskin dalam wilayah kecamatan, akan menjadi ukuran dari penetapan secara administrasi keluarga sasaran penerima manfaat beras miskin.

Dalam implementasi program raskin harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan

indikator kinerja pelaksanaan raskin ini merupakan ukuran tepat menilai kesuksesan dan ketepatan implementasi beras raskin. Indikator kinerja pelaksanaan raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. (Depdagri,2007;22)

Indikator pertama adalah tepat sasaran. Pelaksanaan dikatakan tepat sasaran apabila raskin hanya diberikan kepada keluarga miskin, yang terdaftar dalam data penerima manfaat, lurah Desa Banguntapan menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa menggunakan data dasar keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dari BKKBN.

Dari hasil wawancara dengan Bpk Suparjo (warga). mengakui bahwa beliau belum terdaftar dalam program Raskin, menurut pengakuannya bahwa ada anggota masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi menerima program raskin.

Darai hasil wawancara sebelum penelitian menunjukkan terdapat beberapa masyarakat yang layak menerima program Raskin tidak terdaftar dalam administrasi, hal ini membuktikan kurang pendataan yang dilakukan oleh panitia atau dari pihak yang berwenang sehingga permasalahan ini menarik bagi peneliti untuk mendalami penelitian ini.

Indikator kedua adalah indikator tepat jumlah, pelaksanaan dikatakan tepat jumlah bila jumlah Raskin yang dibeli oleh sasaran penerima manfaat sama dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh hasil

musyawarah tim raskin daerah. Di lapangan pelaksanaan beras raskin ini bermasalah dalam jumlah, dimana jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penerima, hal ini mengakibatkan penundaan pembagian. Sehingga mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat, artinya tidak tepat dalam indikator pelaksanaan raskin.

Indikator ketiga adalah tepat harga, harga beras yang dibayarkan oleh keluarga miskin penerima manfaat harus tepat yaitu pada harga Rp.1.600/Kg netto dititik pendistribusian. (Departemen dalam Negeri dan Perum Bulog 2009).

Indikator keempat adalah tepat administrasi raskin harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat tepat administrasi, artinya penerima raskin terlebih dahulu didata oleh petugas yang kemudian masing-masing masyarakat miskin yang berhak menerima diberikan kartu anggota raskin, waktu penyerahan beras raskin dari aparat kepada warga masyarakat penerima raskin selalu disertai tanda terima. Dengan adanya kartu anggota dan tanda penerima tersebut akan dapat memperlancar proses distribusi dan dapat dihindari dari penyelewengan.

Indikator kelima adalah tepat waktu, pelaksanaan raskin harus tepat waktu, sesuai dengan jadwal dari aparat pelaksana raskin yang setiap awal bulan dan langsung didistribusikan kepada penerima manfaat beras raskin melalui dukuh dan RT masing-masing. Dengan ketepatan waktu sangat

membantu warga masyarakat penerima manfaat raskin dalam kebutuhan. Namun dalam distribusi Raskin sering terlambat dalam penyaluran dari pemerintah, sehingga pembagian tidak tepat jadwal yang telah disesuaikan oleh panitia penyelenggara Raskin

Indikator keenam adalah tepat kualitas, pelaksanaan dikatakan tepat kualitas apabila kualitas beras raskin terpenuhi persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kualitas Raskin yang diterima rumah tangga sasaran Raskin ditahun sebelumnya dibawah standard beras di pasar. Akan tetapi di tahun 2010, pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan beras Lokal yang memiliki kualitas standar. Keterangan di ambil dari seseorang warga

(Bpk. Dwi Anggono) bahwa beras yang diterima pada hari pertama beras lokal yang memiliki kualitas bagus akan tetapi, akibat penundaan, beras yang diterima tercampur dengan beras lama.”

Dari hasil keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas beras yang diterima penerima manfaat beras miskin adalah jauh dari kualitas standar beras.

Sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin, di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya indikator tepat sasaran penerima manfaat dalam implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Desa Banguntapan.
2. Tidak terpenuhinya indikator tepat jumlah beras yang di terima oleh rumah tangga miskin dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Desa Banguntapan.
3. Tidak sesuai indikator tepat harga beras dalam program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Desa Banguntapan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan indikator tepat waktu pendistribusian program beras untuk rumah tangga miskin di Desa Banguntapan
5. Kurangnya pelaksanaan indikator tepat administarsi secara benar dalam program beras miskin untuk rumah tangga miskin (raskin) di desa Banguntapan
6. Belum terpenuhinya indikator tepat kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog dalam program (raskin) di Desa Banguntapan.

7. Kurangnya sosialisasi internal (pelaksana/pengelola Program Raskin), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), serta koordinasi antara instansi terkait di Desa Banguntapan.

C. Pembatasan Masalah.

Mengingat luasnya identifikasi permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah, penelitian ini akan dijelaskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan indikator-indikator kinerja program dalam Implementasai program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Desa Banguntapan.
2. Sosialisasi internal (pelaksana/aparat desa), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), dalam koordinasi antara instansi terkait di desa Banguntapan

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan indikator-indikator kinerja program terpenuhi dalam Implementasai program beras miskin (raskin) untuk rumah tangaa miskin di desa Banguntapan?
2. Apakah sosialisasi internal (pelaksana/aparat desa), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), dalam koordinasi antara instansi terkait di desa Banguntapan berjalan dengan baik?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk Mengatahui pelaksanaan indikator-indikator kinerja program yang belum terlaksana dengan benar dalam implementasai program beras miskin (Raskin) untuk rumah tangga miskin di Desa Banguntapan.
2. Untuk Mengatahui tentang sosialisasi internal (pelaksana/aparat desa), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima Raskin), dalam koordinasi antara instansi terkait di Desa Banguntapan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berupa pengertian yang mendalam tentang Program Beras Terhadap Rumah Tangga Miskin (Raskin). Akan berguna dalam perencanaan dan pelaksanaan program terutama bisa digunakan untuk:

- a. Secara Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya mahasiswa PKNH untuk memahami kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan program beras miskin (Raskin)
 2. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Praktis

Memberikan masukan khususnya kepada pemerintah Desa Banguntapan, kabupaten Bantul mengenai permasalahan tentang program beras miskin (Raskin).

G. Batasan Pengertian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti, maka diberikan batasan pengertian sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan (dalam kamus besar bahasa indonesia). Dan difinisi lain implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut (<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/>). Dalam hal ini menyangkut proses pelaksanaan kebijakan program beras miskin (raskin) oleh pemerintah.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog No: 25 tahun 2003: PKK.12/07 2003. Tentang pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin. pasal 1 ayat 1, program beras merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah tertentu.
3. Rumah tangga miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul No: 18 Tahun 2005. Tentang Indikator keluarga Miskin Kabupaten Bantul.

Yang dimaksud dengan rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seperti kebutuhan akan pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dengan layak), sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas), papan (tempat tinggal/rumah berlantai tanah/berdinding bambu/beratap rumbia), kesehatan, pendidikan, kekayaan, air bersih, dan jumlah jiwa.

Jadi yang dimaksud dengan implementasi program beras untuk rumah tangga miskin adalah tercapainya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan program beras miskin (raskin) yang menyediakan bantuan beras dalam harga bersubsidi dengan jumlah yang ditentukan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin/rumah tangga miskin. Melalui pelaksanaan program raskin ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil, (Budi Winarno, 2002 : 101-202). Sementara itu Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu, atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar/kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan atau diidentifikasi oleh

keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno,2002:102)

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Wahab,2002:91) bahwa Implementasi *“is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output”*. Ini menggambarkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah perundangan ditetapkan yang memberikan otoritas antara lain pada kebijakan, program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Sementara itu Manzamian dan Sabatier (dalam wahab, 1990) apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan, negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Mencermati hal ini maka berarti implementasi kebijakan mempunyai otoritas atau merupakan tindakan yang kedudukannya menjadi amat penting setelah pembuatan kebijakan.

Walaupun suatu program sudah direncanakan dengan bagus, tetapi belum akan terwujud sebelum adanya proses implementasi dari program

yang bersangkutan. Seperti dinyatakan oleh Muhadjir dan Djarot (1993), bahwa suatu kebijakan publik diadakan untuk memecahkan masalah publik tertentu. Kebijakan yang sudah diputuskan perlu dilaksanakan agar dapat memberikan akibat tertentu pada masyarakat. Proses yang kemudian berlangsung adalah proses implementasi kebijakan. Proses ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, utamanya birokrasi pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting dalam pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (abdul wahab, 1990:45).

Implementasi kebijakan boleh dikatakan mudah untuk dipahami dalam bentuk yang abstrak, tetapi tidaklah demikian bentuknya yang konkrit. Hal ini berarti implementasi kebijaksanaan dengan mudah dapat dipahami dalam konsepnya akan tetapi dalam bentuknya konkrit dalam pelaksanaan dan realisasinya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak sekali kebijakan didasarkan pada ide-ide yang kelihatannya sangat layak ternyata menemui kesulitan ketika harus dipraktikkan di lapangan. Fakta menunjukkan, terutama di negara-negara berkembang bahwa selama ini

pemerintah hanya mampu memformulasikan kebijakan di atas kertas secara ideal namun dalam prakteknya mengalami kegagalan.

Keberhasilan implementasi suatu program adalah hal yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keberhasilan implementasi program itu sendiri merupakan cermin bahwa kebijakan program yang ada itu telah mencapai tujuan. Atau dengan kata lain bahwa suatu kebijakan yang telah diberlakukan perlu diwujudkan dalam bentuk implementasi (suatu tindakan) untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang nyata.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002:110) menentukan enam variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dasar tujuan kebijaksanaan. Ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan ini merupakan uraian tujuan-tujuan dari keputusan kebijakan itu bisa dilihat dari indikator-indikator ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Dengan kata lain, *performance* implementasi kebijakan dapat dilihat dengan menganalisis apakah tujuan-tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh.
- b. Sumber kebijaksanaan. Sumber daya yang tersedia sangat penting, baik bagi sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resource*) karena menunjang

keberhasilan implementasi. Sumber daya dapat berupa dana maupun intensif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi yang efektif menghendaki adanya ukuran-ukuran dan tujuan program yang jelas. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika itu dinyatakan dengan jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu. Namun demikian kejelasan itu sendiri masih perlu di tunjang dengan pola komunikasi antar organisasi yang jelas, sehingga tujuan yang akan dicapai tersebut dapat berhasil dengan baik seringkali menuntut adanya mekanisme dan dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana akan bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaksanaan.
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana ini menurut beberapa ahli administrasi mempengaruhi *performance* implementasi kebijakan. Menurut Meter dan Van Horn karakteristik tersebut mencakup enam faktor yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
 2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan dan proses-proses dalam badan pelaksana;
 3. Sumber daya politik suatu organisasi;
 4. Vitalitas suatu organisasi;
 5. Derajat keterbukaan komunikasi;
 6. Keterkaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dengan keputusan.
- e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian peminat kebijakan publik, sekalipun dampak dari faktor-faktor tersebut telah berpengaruh secara tajam pada kinerja dari badan-badan pelaksana.
- f. Karakteristik pelaksana. Anggapan pelaksana organisasi dimana kebijaksanaan ini diterapkan merupakan alat penyaring dari komponen setiap yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain respon dari pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap implementasi. Ada tiga elemen yang mungkin muncul dan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijaksanaan yaitu kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerima, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut.

Ketiga elemen tersebut penting untuk diperhatikan dalam proses implementasi. Seringkali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi. Apalagi jika mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Yohana Etabibue (1997 : 12) ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut bekerja secara simultan dan berintraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijaksanaan. Keempat factor tersebut adalah.

Pertama, komunikasi prasyarat pertama bagi implementasi yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijaksanaan dan perintah harus diteruskan kepada personel-personel yang tepat sebelum keputusan- keputusan dan perintah-perintah itu dapat diakui. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat dan meneruskannya kepada personel-personel pelaksana yang lain, jika banyak hambatan yang menghadang transmisi komunikasi, akan mengakibatkan terkendalanya implementasi. Dengan demikian, suatu program dapat berhasil bila program tersebut terlebih dahulu diinformasikan dengan jelas dan konsisten serta mudah dipahami.

Kedua, sumber daya. Sumber daya merupakan faktor yang penting sebab jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan maka implementasi mungkin tidak efektif, sumber daya itu meliputi staf yang memadai dengan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas. Begitu juga wewenang dan fasilitas yang diperlukan, jika pelaksana kekurangan wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan akan menyebabkan terkendalanya pencapaian tujuan.

Ketiga, sikap pelaksana atau kecenderungan pelaksana. Sikap dari pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijaksanaan yang efektif. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan, proses implementasi suatu kebijaksanaan semakin sulit. Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana bisa menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang melaksanakan mempunyai pengaruh penting kepada implementasi. Para pelaksana kebijaksanaan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber daya untuk melakukan, tetapi mereka

mungkin dihambat oleh struktur birokrasi dengan ciri adanya kecenderungan unit kerja yang berkembang serta keinginan untuk keseragaman prosedur merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya dari pelaksana serta keinginan keseragaman dalam bekerjanya suatu organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan kecenderungan unit kerja yang berkembang sebagai tanggapan terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi.

Menurut Wiliam Dunn (dalam Tangklisan, 2003: 21). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan;
2. Komunikasi antara organisasi dan pengukuran aktivitas;
3. Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi;
4. Kondisi social, ekonomi dan politik;
5. Sumber daya;
6. Sikap pelaksana.

Menurut Gogin (dalam Tangklisan,2003 :21). Variabel-variabel yang mempengaruhi keseluruhan implementasi kebijakan yaitu:

1. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi;

2. Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif;
3. Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi kecenderungan hubungan antara warga masyarakat termasuk pola komunikasi.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2002) agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi organisasi dan instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan dan kendala;
2. Untuk melaksanakan program/kebijakan harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai;
3. Keterpaduan antar sumber daya (manusia, dana dan fasilitas pendukung lainnya);
4. Kebijakan yang diimplementasikan harus didasari hubungan kualitas yang erat;
5. Hubungan kualitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

8. Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan kewenangan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah itu sejak pembentukan kebijakan harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini berusaha menggabungkan teori-teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh beberapa pakar implementasi kebijakan diatas. Dengan menyeleksi variabel yang tepat dan sesuai dengan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil yang lebih dalam memecahkan persoalan yang ada dalam penelitian.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iplementasi kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin).

Pada dasarnya penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) Di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selain itu juga diharapakan dapat mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN). Faktor yang digunakan oleh penulis adalah faktor yang dikemukakan oleh Edward III dalam Yohana

Etabibue (1997 : 12) yang meliputi empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini hanya digunakan 3 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana.

a. Komunikasi

Faktor ini dipilih karena kegiatan kebijakan raskin melibatkan berbagai instansi serta unsur masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai kesamaan persepsi dan kepaduan langkah, maka dipandang perlu komunikasi dalam organisasi pelaksana, antar organisasi atau pihak pelaksana dengan pihak penerima program sehingga implementasi bisa berjalan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi suatu program. Sumber daya akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan implementasi. Jadi berhasil tidaknya implementasi dipengaruhi oleh tersedia dengan baik (tercukupi) maka implementasi akan berhasil dan sebaliknya jika sumber daya tidak tersedia dengan baik maka implementasi bisa gagal atau terlaksana tetapi tidak efisien dan efektif. Sumber daya yang memadai sangat diperlukan dalam implementasi suatu program agar dapat berjalan dengan baik, tidak terkecuali dengan program Raskin, keberadaan sumber daya sangat

menentukan keberhasilan implementasi program ini. Bagaimanapun bagusny suatu kebijakan dirumuskan bila tidak didukung sumber daya yang cukup maka implementasi tersebut akan mengalami kegagalan.

c. Sikap Pelaksana

Selain itu sikap dari pelaksana juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang telah diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Akan tetapi apabila tingkah laku pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses implementasi kebijakan semakin sulit. Kecenderungan-kecenderungan pelaksana bisa menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Dengan kata lain respon dari pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap implementasi. Sering kali kegagalan kebijaksanaan di sebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi untuk itu pelaksana harus memiliki persepsi yang baik terhadap program raskin

B. Tinjauan Umum Tentang Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

1. Pengertian

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program tranfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainya (Depdagri, 2005:1)

2. Tujuan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Tujuan Program Raskin adalah memberikan bantuan beras bersubsidi kepada keluarga miskin untuk memenuhi sebagian kebutuhannya dengan jumlah dan harga tertentu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Sasaran program raskin adalah terpenuhinya sebagian kebutuhan kalori dan gizi dalam bentuk beras bagi sekitar 15,79 juta keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera I dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

3. Distribusi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Titik distribusi adalah tempat di desa/kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat atau jika lokasi desa sulit dijangkau dapat ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara pemda dengan Diver/Sub Diver/kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada pelaksana Distribusi. Pelaksana distribusi adalah aparat desa/kelurahan yang dibantu oleh warga masyarakat setempat (kader KB, Tim Pengerak PKK, Karang Taruna atau unsur masyarakat lain) dan ditunjukkan oleh kepala desa/lurah.

Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan pagu raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa/kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Musyawarah desa/kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat desa/kelurahan, (termasuk kepala dusun/lingkungan, dukuh, RW, RT), PLKB anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah desa/kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat

(format Model DPM-1) dan ditandatangani kepala desa/lurah serta disahkan oleh camat setempat.

Indikator kinerja pelaksanaan Raskin adalah: tepat sasaran , tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. (Depdagri, 2009;5).

- a. Tepat sasaran yaitu raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat;
- b. Tepat jumlah yaitu jumlah beras yang dibeli keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai hasil keputusan gubernur/bupati/walikota.
- c. Tepat harga yaitu harga beras yang dibayar oleh kelurga sasaran penerima manfaat sebesar Rp. 1600/Kg netto di titik distribusi;
- d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksana distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi;
- e. Tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu;
- f. Tepat kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualiatas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologi berasal dari kata miskin yang mendapat imbuhan ‘ke-an’ yang berarti mengubah gaya dari sifat kepada suatu keadaan (kata benda) kata miskin dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995) berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Dengan demikian kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan yang serba kekurangan sebagai akibat tingkat pendapat yang rendah.

Definisi kemiskinan biasa dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, atau dilukiskan pada mereka yang berpenghasilan jauh dibawah mereka yang berpenghasilan lebih baik.

Pengertian kemiskinan secara sederhana selalu dikaitkan dengan rendahnya pendapat dan kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana diungkapkan oleh Tadjudin Noer effndi bahwa: kemiskinan sekelompok orang yang dikaitkan pendapat dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan hanya mengacu kepada kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak minimum maka orang dan keluarga itu dapat dikategorikan miskin. (Tadjudin Noer Effendi,1995:202).

Kemiskinan yang menghinggapi manusia tentunya tidak datang dengan sendirinya, atau bahkan kemiskinan datang dari Tuhan. Kemiskinan biasanya terjadi karena mereka tidak mempunyai keterampilan, taraf pendidikan yang rendah. Menurut Ginanjar Kartasasmita (Ginanjar Kartasasmita, 1997:15) sekurang-kurangnya ada empat hal penyebab kemiskinan.

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya fisik, daya fikir dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan Kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan rantai kemiskinan itu.
- d. Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerakan kemajuan yang dinikmati masyarakat lain.

Keempat penyebab yang diuraikan di atas menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena berpendidikan rendah produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Akibat rumah tangga miskin menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi penerusnya.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada umumnya terutama di daerah pedesaan memerlukan upaya-upaya agar kemiskinan itu dapat diselesaikan. Tugas dari pengentasan kemiskinan ini sebenarnya berada pada tangan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mengurangi kemiskinan.

Satu hal yang tampak harus dipikirkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah perlu memikirkan kebijakan yang dapat meningkatkan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat menciptakan peluang kerja serta mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara mandiri (Tadjuddin Noer Effendi, 1995:266). Upaya yang perlu dilakukan pertama-tama adalah berusaha merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan akses mereka pada pengontrolan dan keikut

sertaan dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Selain itu perlu ada kebijakan relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, merangsang peningkatan pendapatan dan perluasan peluang kerja. Upaya ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan menyediakan modal dan perbaikan-perbaiki organisasi atau institusi keuangan. Hal lain yang cukup penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana mengalihkan penduduk miskin dari peluang kerja yang kurang produktif ke pekerjaan produktif. (Tadjuddin Noer Effendi, 1995:267)

2. Penanggulangan Kemiskinan.

Tanpa mengurangi arti penting upaya penanggulangan kemiskinan telah dan sedang dilakukan adalah penting untuk memikirkan alternatif pendidikan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara mandiri.

Upaya yang perlu dipikirkan adalah berusaha merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan akses mereka pada pengontrolan dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Artinya, partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perlu ditingkatkan. Itu perlu diikuti pemberdayaan, baik secara politis, sosial maupun hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kemampuan masyarakat dan individu (*self-consciousness*) dengan meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan kesadaran politik, sosial dan hukum dapat menimbulkan kesadaran tentang hak-hak politik, kesadaran sosial, dan hak-hak hukum.

Selain itu, perlu adanya kebijakan relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi regional, merangsang peningkatan pendapatan, dan perluasan peluang kerja. Untuk mencapai sasaran itu perlu adanya upaya mendekatkan penduduk miskin pada akses dan pelayanan sarana keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih menekankan pada peningkatan akses dan kemudahan pada pasar, seperti sistem monopoli, perlu dihapuskan. Promosi pembangunan dipusatkan pada pengembangan ekonomi rakyat

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11)

kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. (RPJM Nasional 2010-2014: 45)

Salah satu visi misi dari kebijakan nasional adalah penanggulangan kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan *Parenting Education* mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012;
2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung;

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4. Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian diskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 1995: 310). Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Tailor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (dalam Moleong,2002:3)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul. Hal ini didasari fakta bahwa telah dilaksanakan Program Pemerintah yaitu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011.

C. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:106) subjek penelitian merupakan orang, dan benda sumber dari mana data diperoleh. Maka peneliti memilih dan menentukan subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik sampel (*purposive sampel*) dengan mempertimbangkan kriteria subjek dalam penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yaitu aparat pelaksana Raskin, masyarakat penerima Raskin, dukuh, dan tokoh masyarakat di Desa Banguntapan yang sedang menangani program Raskin. Berdasarkan kriteria tersebut maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Banguntapan.
2. Satu orang bagian kemasyarakatan (Kesra) urusan administrasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan kegiatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
3. Tiga orang Dukuh dari setiap padukuhan yaitu dukuh gedungkuning, dukuh wonocatur, dan dukuh pelumbon di Desa Banguntapan
4. Empat orang tokoh masyarakat setempat.
5. Lima belas masyarakat penerima manfaat Raskin di Desa Banguntapan

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data yaitu;

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2002:135). Maksud digunakannya metode ini adalah memperoleh keterangan atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data yang akan digali melalui wawancara ini berkaitan dengan pendapat atau pernyataan dari sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Untuk melakukan wawancara di lapangan peneliti melakukan perjanjian dengan subjek penelitian seperti Aparat/pelaksana yang bertanggung jawab atas program ini jauh hari selain itu juga peneliti langsung ke titik tempat pendistribusian untuk melakukan wawancara langsung kepada kepala rumah tangga penerima manfaat program raskin ini dan panitia pelaksana kegiatan yang kebanyakan dari Ibu-ibu PKK di Desa Banguntapan. Untuk melakukan wawancara di lapangan peneliti juga mendapat kendala untuk mendapatkan subjek yang akan diwawancarai;

karena kebanyakan dari kepala rumah tangga yang menerima manfaat menolak untuk diwawancarai, akan tetapi kendala itu tidak menghalangi peneliti mencari data tentang indikator-indikator tepat guna dalam program Raskin ini.

Ada pun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari subyek penelitian yaitu aparat pelaksana/panitia pelaksana kegiatan program Raskin dan masyarakat atau kepala rumah tangga miskin yang menerima manfaat program beras miskin ini di Desa Banguntapan. Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang indikator-indikator kinerja tepat guna dan sosialisasi internal, sosialisai ekstranal dalam koordinasi pelaksanaan program manfaat beras miskin utuk rumah tangga miskin di Desa Banguntapan.

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara, berisi tentang garis pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok yang direncanakan tersebut tercakup seluruhnya (Moleong, 2007:187). Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang dijadikan pedoman untuk mengontrol jangan sampai proses

wawancara kehilangan arah, sehingga pertanyaan yang diajukan selalu terarah pada pokok permasalahan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan jalan melihat dan mencatat dokumen yang ada. Menurut Guba dan Lincoln dalam Lekxy J. Moleong (2002:161) dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. dari pelaksanaan indikator-indikator kinerja program dalam implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Banguntapan.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah struktur dari pemerintah desa pada bagian umum yang mengelola dan panitia pelaksanaan di setiap titik pendistribusian dan pembagian beras miskin di Desa Banguntapan Kabupaten bantul, gambar dan data tentang kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan program Raskin, dan laporan-laporan kegiatan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Pengamatan (observasi)

Pada pengumpulan data, peneliti tidak hanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, tetapi juga menggunakan metode pengamatan (*observasi*) objek pengamatan dalam penelitian ini adalah perilaku dalam kegiatan pelaksanaan indikator-indikator kinerja program raskin dan sosialisasi internal (pelaksana/pengelola Program Raskin), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), serta koordinasi antara instansi terkait dalam implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Banguntapan.

Media pengamatan dalam penelitian ini menggunakan panca indra yaitu pengelihatan dan pendengaran. Hasil dari pengamatan dicatat dan selanjutnya dianalisis. Demi kelancaran penelitian, peneliti berusaha agar yang diamati tidak merasa diamati agar tidak mengganggu dalam kegiatan dan menyebabkan perilaku pelaksana terganggu dengan kehadiran peneliti dalam pengamatan

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dari data yang ada terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Lexy J Moleong, 2002 : 15), yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai perbandingan/pengecekan terhadap

data. Cara yang dapat digunakan dalam triangulasi data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber data, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan menggunakan triangulasi sumber dapat membandingkan data wawancara, dokumentasi dan observasi tentang indikator-indikator kinerja program dalam implementasi Raskin, dan sosialisasi internal (pengelola/pelaksana program raskin) serta sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), serta koordinasi antara instansi terkait di desa Banguntapan tersebut dengan data dokumentasi yang di peroleh tentang sosialisasi eksternal (masyarakat penerima Raskin), serta koordinasi antara instansi terkait di Desa

Banguntapan. Dengan data pengamatan mengenai kegiatan implementasi program beras untuk rumah tangga miskin dengan indikator-indikator kinerja program raskin dan sosialisasi internal (pengelola/pelaksana program Raskin) dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima Raskin), serta koordinasi antara instansi terkait di Desa Banguntapan.

F. Teknik Analisis Data

Bersamaan dengan pengumpulan data, peneliti juga melakukan analisis data, yang notabene menggunakan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif. Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan saluran uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian". (Dalam Lexy J. Moloeng, 2001:18).

Langkah-langkah yang akan di tempuh dalam teknik analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Adapun data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai implemntasi program beras untuk rumah tangga miskin di Desa Banguntapan dan kemudian dilakukan penggolongan ke dalam beberapa bagian. Kemudian dari masing-masing bagian tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan sistematikanya. Adapun perolehan data mengenai hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian, tidak dimasukkan dalam penyajian hasil, namun tetap disimpan untuk masa yang akan datang jika diperlukan.

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak betumpuk dan mempersulit analisis selanjutnya

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks (Miles, 1992:17-18). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Dalam display data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Pengambilan kesimpulan

Data yang diperoleh disimpulkan dengan terus diperiksa apakah ada penambahan dengan masuknya data baru agar kesimpulan lebih mengena atau mendalam. Lexy J. Moleong mengatakan untuk mendapatkan data secara absah dilakukan dengan pengecekan pada beberapa sumber dengan teknik triangulasi (Lexy J Moleong,2002;179)

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian dengan persepektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan dan diadakan pembuktian keotentikan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara

berpikir induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian tentang program beras untuk rumah tangga miskin di Desa Banguntapan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Diskripsi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Banguntapan merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banguntapan memiliki wilayah seluas : 390,0550 Ha.

1. Luas wilayah Desa Banguntapan : 389.2550 Ha
 - a. Tanah Sawah : 277.6950 Ha
 - b. Tanah Tegalan : 9.4735 Ha
 - c. Tanah Pekarangan : 92.6865 Ha
 - d. Tanah lain-lain : 94.000 Ha
2. Batas Wilayah :
 - a. Utara : Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
 - b. Timur : Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
 - c. Selatan : Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
 - d. Barat : Kota Yogyakarta.
3. Desa Banguntapan terdiri dari 11 dusun yaitu:
 - a. Sorowajan
 - e. Tegaltandan
 - i. Palemwulung
 - b. Karangbendo
 - f. Wonocatur
 - j. Pringgolayan

- c. Karangjambe
- d. Plumbun
- g. Jomblangan
- h. Jaranan
- k. Modalan

4. Orientasi Desa Jarak Kantor Pemerintah Desa Banguntapan Dengan :

- Kantor Kecamatan Banguntapan : 3 Km
- Kantor Kabupaten Bantul : 15 Km
- Kantor Provinsi DIY : 9 Km.

5. Keadaan Tanah

- a. Jenis Tanah : Berpasir
- b. Sumber air : Mata air dan Sungai
- c. Iklim : Sub Tropis

2. Keadaan Demografis

Secara administratif pemerintahan Desa Banguntapan terbagi dalam 11 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 33.290 jiwa, terdiri dari 16.577 orang laki-laki dan 16.713 orang perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki (usia produktif) yang meninggalkan desa untuk bekerja. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Banguntapan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Komposisi Penduduk Menurut Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	%
0 – 14	6.564	19.72
15 - 24	6.261	18.81
25 - 49	13.274	39.87
> 50	7191	21.60
Jumlah	33.290	100.00

Sumber: Monografi Desa Banguntapan 2010

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut usia tersebar secara merata sehingga memungkinkan adanya regenerasi.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Banguntapan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.2.

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	%
1	Petani	478	2.55
2	Buruh tani	655	3.49
3	Perkebunan	5	0.3
4	Pedagang	1.528	8.15
5	Pegawai negeri	2.299	12.26
6	Pegawai swasta	3.165	16.88
7	Industri RT	546	2.91
8	Lain-lain	10.073	53.73
	Jumlah	18.749	100

Sumber : Monografi Desa Banguntapan 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani kemudian diikuti buruh serabutan, swasta, pegawai negeri sipil, TNI dan lain-lain. Penduduk Desa Banguntapan yang bekerja adalah 5.705 orang sedangkan yang lainnya terdiri dari anak-anak balita, anak sekolah, manula, dan sebagian kecil yang menganggur.

Tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Distribusi

Penduduk Desa Banguntapan menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)	%
1	Belum sekolah	1.727	5,19
2	Tidak sekolah	7.674	23,05
3	Taman kanak-kanak	1.528	4,59
4	Sekolah dasar	4.804	14,43
5	SMP/SLTP	4.108	12,34
6	SMA/SLTA	7.645	22,96
7	Akademi/PT	4.840	14,54
	Jumlah	33.290	

Sumber : *Monografi Desa Banguntapan 2010*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa walaupun komposisi tingkat pendidikan penduduk pada tingkat sarjana masih relatif sedikit namun pada tingkat SLTA sudah sangat banyak. Dengan peningkatan ini diharapkan masyarakat desa dapat memberdayakan seluruh potensi desanya demi pembangunan dan kesejahteraan.

3. Pemerintah Desa Banguntapan terdiri dari :

a. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas kepala desa mempunyai wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan bersama BPD.
- Mengajukan rancangan peraturan desa untuk dimintakan persetujuan BPD.
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan anggaran desa.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Membina perekonomian desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya.
- Mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh sekretaris desa kepada bupati.
- Memberikan pertimbangan penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) kepada bupati.
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Lainnya.

- Melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya.
- Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat desa.
- Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya yang mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- Membina dan melaksanakan kehidupan demokrasi.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
- Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- Membina dan mengayomi serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mempunyai tugas :

- Menyelenggaraan penata usahaan, kearsipan, perpustakaan, administrasi personalia perangkat desa.
- Menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.

- Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa.
- Menyelenggarakan penyusunan rancangan peraturan desa dibantu oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- Menyelenggarakan pemberian pelayanan administrasi pemerintahan.
- Membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat desa lainnya.
- Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai Langkah dan tindakan yang akan diambil.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Kepala Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan ketatausahaan.
- Melaksanakan tugas administrasi
- Mendata kekayaan desa
- Melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana prasarana desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor desa serta menyiapkan tempat/peralatan rapat dan lain-lain.

- Menginventarisasi, merencanakan, dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana fisik desa.
- Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- Memberikan sasaran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.

d. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas :

- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa.
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa.
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik tingkat desa.
- Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

e. Bagian Pembangunan

Bagian pembangunan mempunyai tugas :

- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa.
- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa.
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa.
- Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

f. Bagian Kemasyarakatan

Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk.
- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sosial.
- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

g. Bagian Pendapatan

Bagian pendapatan mempunyai tugas :

- Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes, perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes.
- Mengelola, merencanakan, melaksanakan administrasi keuangan desa.
- Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa.

- Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

h. Dukuh

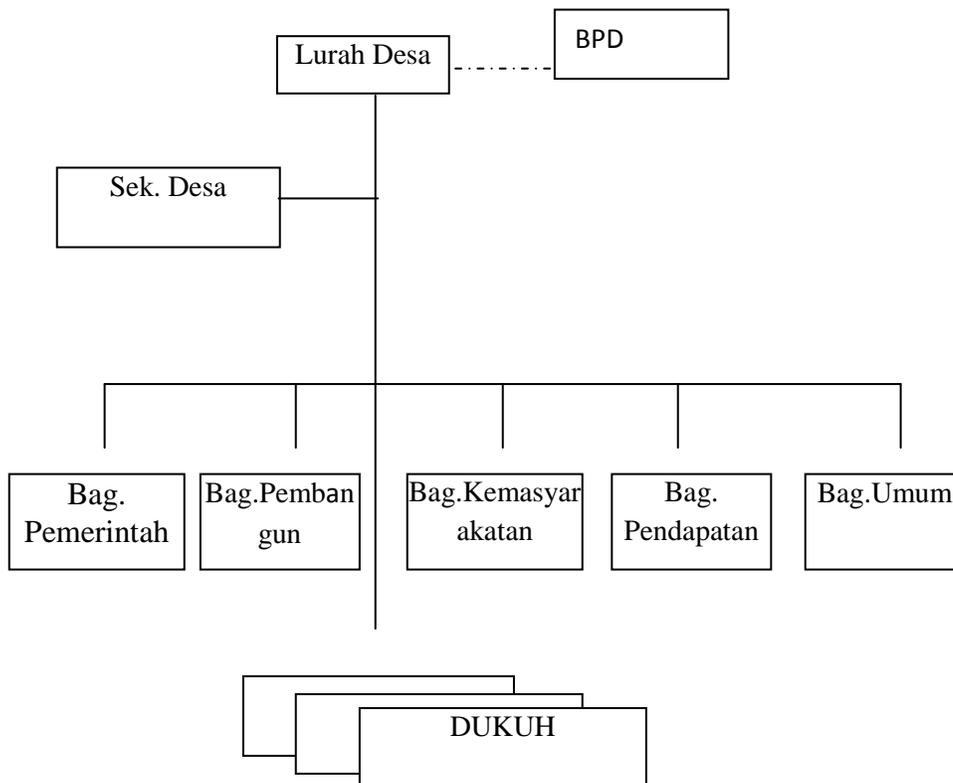
Pedukuhan berkedudukan sebagai unsur wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Pedukuhan dipimpin oleh seorang dukuh yang merupakan pembantu kepala desa dalam wilayah pedukuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Dukuh berkedudukan dibawah kepala desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Dukuh mempunyai tugas :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah pedukuhan;
- Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah pedukuhan;
- Melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa, di wilayah pedukuhan;

- Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Banguntapan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Kantor Desa Banguntapan 2011

5. Profil Pokmas Penerima Raskin

a. Program Beras untuk Rumah tangga Miskin (Raskin)

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan transfer energy dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

1. Tujuan

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.

2. Sasaran

Sasaran program raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin yang tergolong sangat miskin dan miskin menurut data BPS melalui pendistribusian beras bersubsidi selama 12 bulan dengan harga yang murah dan terjangkau di titik distribusi.

3. Pengertian

- a. Program beras untuk rumah Tangga Miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan ketentuan sesuai hasil musyawarah tim Raskin daerah.
- b. Pemda adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota / kecamatan / desa/ kelurahan.
- c. Satuan tugas (satgas) Raskin adalah unit kerja yang dibentuk kepala divisi regional/kepala sub divisi regional/kepala kantor logistik (kadvre/kasubdivre/kakanlog) perum bulog yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi. Satgas diketuai oleh pegawai Perum bulog dan anggotanya dapat terdiri dari pegawai Perum Bulog dan diluar Perum Bulog yang ditetapkan.
- d. Pelaksana distribusi adalah aparat desa/kelurahan yang di bantu oleh warga masyarakat setempat (kader KB, Tim pengerak PKK, karang Taruna atau unsur masyarakat lain) dan ditunjuk oleh kepala Desa/Lurah.
- e. Keluarga sasaran penerima manfaat raskin adalah keluarga miskin di desa/ kelurahan yang berhak menerima beras Raskin, sebagai hasil seleksi berdasarkan musyawarah desa/kelurahan menggunakan

refrensi dasar data BKKBN (keluarga Prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi), ditetapkan oleh kepala desa/kelurahan dan oleh kecamatan setempat.

- f. Tim Raskin pusat adalah tim yang terdiri dari wakil/pejabat tingkat pusat dari kantor Menko Perekonomian, kantor Menko Kesra, Bappenas, Ditjen Anggaran dan Pertimbangan Keuangan Depkeu, Dijen PMD Depdagri, BKKBN, Badan Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris KPK, Perum Bulog dan Institusi terkait lain.
- g. Tim Raskin daerah adalah tim antara instansi yang terdiri dari wakil pejabat tingkat propinsi (untuk tingkat provinsi) dan wakil/pejabat tingkat kabupaten/kota (untuk tingkat kabupaten/kota) unsur pemda, BKKBN, KPK, kepala divisi regional/kepala sub divisi regional/kepala kantor logistik dan instansi terkait lain.

b. Pengorganisasian Tingkat Pusat

1. Organisasi pengelola program Raskin secara nasional adalah tim Raskin pusat.
2. Penanggung jawab perencanaan program Raskin adalah ketua Bappenas
3. Penanggung jawab pembinaan program dan pelaksana Raskin di daerah serta penanganan pengaduan masyarakat adalah menteri dalam negeri c.q. dirjen.

4. Penanggung jawab penyediaan subsidi untuk program Raskin adalah departemen keuangan c.q. dirjen anggaran dan perimbangan keuangan.
5. penanggung jawab penyediaan data dasar keluarga prasejahtera dan Keluarga sejahtera 1 untuk penetapan keluarga sasaran penerima manfaat yang berkaitan dengan jumlah, pemutakiran dan penyebaran adalah kepala BKKBN.
6. Penanggung jawab penyediaan dan distribusi beras Raskin sampai titik distribusi, penyelesaian pembayaran dari keluarga sasaran penerima manfaat dan penagihan subsidiya adalah direktur utama Perum Bulog.

c. Pengorganisasian Tingkat Daerah

1. Organisasi pelaksana program Raskin di tingkat daerah adalah tim Raskin provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan.
2. Penanggung jawab pelaksana dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi Raskin di tingkat provinsi/kabupaten/kota adalah gubernur/bupati/walikota sesuai tingkat wilayah. Dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh tim Raskin provinsi/kabupaten/kota adalah gubernur/bupati/walikota sesuai tingkatan wilayah. Dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh tim raskin propinsi/kabupaten/kota serta berbagai pihak yang

dipandang perlu seperti perguruan tinggi dan institusi kemasyarakatan lainnya.

3. Penanggung jawab penyediaan data dasar keluarga miskin sebagai referensi musyawarah desa/kelurahan untuk penetapan keluarga sasaran penerima manfaat Raskin adalah BKKK.
4. Penanggung jawab penetapan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat dan pagu kuantum beras adalah gubernur/bupati/walikota sesuai tingkatan wilayah sebagai hasil konsultasi teknis bersama tim raskin dengan pertimbangan proporsi jumlah keluarga miskin dan kondisi obyektif daerah yang bersangkutan.
5. Penanggung jawab penetapan keluarga sasaran penerima manfaat di setiap desa/kelurahan adalah kades/kepala sebagai hasil musyawarah desa/kelurahan dan disahkan oleh camat setempat
6. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang perum bulog sampai titik distribusi maupaun penyelesaian administrasi dan pembayaran adalah kepala divisi regional/kepala sub divisi regional/kepala kantor logistik Perum Bulog sesuai dengan tingkat wilayahnya, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh satgas Raskin.

7. Penanggung jawab pendistribusian beras raskin dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima manfaat adalah pemda setempat sesuai tingkat wilayahnya (camat/kepala desa/lurah) dan sebagai pelaksanaannya adalah pelaksana distribusi. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.
8. Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat adalah kepala dinas/badan PMD, dan sebagai pelaksanaannya adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/walikota dengan beranggotakan aparat dari dinas dan PND, Bawasda, kepala divisi regional/kepala sub divisi regional/kepala kantor logistik Perum Bulog dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

d. Perencanaan Distribusi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pendistribusian Raskin sesuai dengan besarnya subsidi Raskin yang disediakan pemerintah, maka disusun perencanaan pendistribusian Raskin yang meliputi waktu dan frekuensi pendistribusian serta kuantum raskin yang dapat dibeli keluarga sasaran penerima manfaat.
2. Waktu pendistribusian tidak dilaksanakan pada musim panen padi agar tidak mengganggu pengamanan harga dasar pembelian pemerintah

gabah dan beras, sehingga frekuensi distribusi Raskin dapat dilaksanakan kurang dari 12 kali. Khusus daerah yang sulit di jangkau, waktu dan frekuensi distribusi disesuaikan dengan kondisi obyektif dan kemampuan daerah.

3. perhitungan kuantum raskin yang dapat di beli masing-masing keluarga sasaran penerima manfaat setiap adalah kuantum pagu raskin dibagi jumlah keluarga sasaran penerima manfaat dibagi frekuensi distribusi Raskin.
4. Prencana distribusi tersebut dituangkan dalam surat keputusan gubernur/bupati/walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan Raskin di tingkat daerah.

e. Penentuan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat

1. Berdasarkan surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat, kepala desa/kepala menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa/kelurahan menggunakan data dasar keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dan BKKBN.
2. Musyawarah desa/kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat desa/kelurahan (termasuk kepala dusun/lingkungan, dukuh, RW, RT), PLKB, anggota badan

permusyawaratan desa/dewan kelurahan, institusi kemasyarakatan desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin.

3. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah desa/kelurahan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa/kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (Format Model DPM-1) dan ditandatangani kepala desa/kepala serta disahkan oleh camat.
4. Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat setiap desa/kelurahan dilaporkan secara berjenjang ketingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga sasaran penerima manfaat sesuai tingkatan wilayahnya dan menjadi dasar pembuatan surat permintaan alokasi (SPA) oleh bupati/walikota setempat.
5. Keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam DPM-1 diberikan kartu Raskin dari kades/kepala yang disediakan oleh kepala divisi regional/kepala sub divisi regional/kepala kantor logistik setempat. Kartu Raskin merupakan tanda bukti keluarga yang berhak membeli Raskin.

b. Keanggotaan Pokas Penerima Raskin

1. Anggota pokmas menurut padukuhan. Jumlah anggota pokmas menurut padukuhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Anggota Pokmas Menurut Padukuhan

No.	Padukuhan	Jumlah KK
1.	Gedungkuning	104
2.	Jaranan	70
3.	Jomblangan	70
4.	Wonocatur	140
5.	Karangjambe	59
6.	Karangbendo	55
7.	Sorowajan	119
8.	Pelumbun	199
9.	Palamwulung	40
10	Pringolayan	83
11.	Modelan	44
	Jumlah	983 KK

Sumber data : Kantor Desa Banguntapan Bantul 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerima Raskin di Desa Banguntapan Bantul adalah 983 KK yang tersebar secara merata di setiap padukuhan di Desa Banguntapan Bantul.

2. Anggota pokmas penerima Raskin menurut tingkat pendidikan

Anggota pokmas penerima Raskin di Desa Banguntapan Bantul menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Anggota pokmas penerima Raskin menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	361
2.	SD	564
3.	SMP	44
4.	SMA	13
5.	Sarjana	1
	Jumlah	983

Sumber data : Kantor Desa Banguntapan Bantul2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerima Raskin di Desa Banguntapan Bantul sebagian besar adalah tidak tamat SD dan tamat SD, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak bergantung pada Raskin.

3. Anggota pokmas penerima Raskin di desa Banguntapan menurut tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.6

Anggota pokmas penerima Raskin menurut pekerjaan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Buruh Tani	473
2.	Buruh Bangunan	331
3.	Tani	92
4.	Wiraswasta	14
5.	Karyawan	43
6.	Srabutan	66
	Jumlah	983

Sumber data : Kantor Desa Banguntapan Bantul 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerima Raskin di Desa Banguntapan Bantul sebagian besar adalah buruh tani dan buruh bangunan. Karena buruh tani dan buruh bangunan tidak memiliki penghasilan yang tetap, terkadang mereka juga bekerja pada musim tertentu dan terkadang mereka menganggur di rumah.

B. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Pembahasan.

Analisis data merupakan suatu cara pengelolaan data yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian dilapangan. Pengelolaan dimaksudkan untuk membuktikan keterangan empiris yang dikemukakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) (studi kasus Di Desa Banguntapan Bantul). Sebelum penyusun

melakukan analisis lebih jauh tentang hasil penelitian, terlebih dahulu disajikan distribusi responden menurut jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

2. Analisis Data

Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu menyediakan sebagian kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang mendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas dan produktivitas keluarga miskin.

Tujuan program Raskin adalah memberi bantuan beras subsidi kepada keluarga miskin untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya dengan jumlah dan harga tertentu, dalam rangka meningkatkan ketahanan rumah tangga.

Program Raskin harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan indikator kinerja pelaksanaan Raskin adalah : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi.

2.1 Implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin. (Raskin) di desa Banguntapan Bantul.

1. Sasaran Beras Raskin

Raskin harus tepat sasaran artinya harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yaitu keluarga miskin. Lurah desa Banguntapan Bantul menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa menggunakan data dasar keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dari BKKBN. Secara umum pelaksanaan pendistribusian Raskin di desa Banguntapan Bantul tidak ada masalah.

Untuk mengetahui apakah pendistribusian Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah tepat sasaran dapat dilihat pada hasil pernyataan berikut:

Berdasarkan pernyataan salah seorang penerima Raskin diperoleh jawaban bahwa:

“Raskin telah diberikan sesuai dengan sasaran, saya menerima Raskin karena keluarga saya tergolong tidak punya dan hidup pas-pasan, menurut sepengetahuan saya semua warga masyarakat yang berhak menerima raskin telah terdaftar dan menerima raskin serta tidak ada yang salah sasaran.”
(wawancara dengan Ibu Puji Rahayu tanggal 4 Febuari 2011)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa raskin telah diberikan tepat sasaran, semua warga yang berhak telah menerima beras raskin.

Lebih lanjut seorang pengurus PKK menyampaikan sebagai berikut:

“Raskin diberikan sesuai sasaran yaitu pada keluarga miskin yang ditentukan berdasarkan hasil pendataan keluarga miskin dari BKKBN yaitu keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi, saya pernah mendengar keluhan dari warga masyarakat mengapa yang diberi itu-itu saja kemudian saya jelaskan bahwa sesuai aturan memang mereka yang berhak akhirnya mereka bisa memahami dan menerima”. (wawancara dengan Ibu Sriyanto tanggal 5 Februari 2011)

Hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa raskin telah diberikan tepat sasaran yaitu pada keluarga miskin yang ditentukan berdasarkan hasil pendataan keluarga miskin oleh BKKBN dengan kriteria keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi.

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator keluarga sejahtera tahap I.

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan dan interaksi dalam lingkungan tempat tinggal.

Telah dipenuhi indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing;

- b. Makan dua kali sehari/lebih;
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan;
- d. Rumah (lantai bukan dari tanah);
- e. Kesehatan (anak sakit/pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan);

Lebih lanjut salah seorang petugas pelaksana Raskin yaitu petugas BKKBN menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya raskin telah diberikan sesuai sasaran yaitu pada keluarga miskin yang ditentukan sesuai dengan hasil pendataan keluarga miskin yang telah dilaksanakan oleh BKKBN, kriteria orang yang menerima raskin adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I alasan ekonomi.pada prinsipnya semua warga masyarakat yang berhak menerima telah terdaftar, memang ada data susulan tetapi karena perubahan status

Dari pernyataan dengan aparat pelaksana Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa Raskin telah diberikan sesuai sasaran yaitu pada keluarga miskin yang ditentukan sesuai dengan hasil pendataan keluarga miskin yang telah dilaksanakan oleh BKKBN, kriteria orang yang menerima Raskin adalah keluarga prasejahtera dan sejahtera I, pada prinsipnya semua warga masyarakat yang berhak menerima telah terdaftar, memang ada data susulan tetapi karena perubahan status warga tersebut. Seandainya ada warga masyarakat yang merasa berhak menerima Raskin tetapi belum memperoleh jatah Raskin pengurus selalu siap menerima keluhan dan masukan dari

masyarakat untuk selanjutnya dilakukan pendataan ulang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian pelaksanaan Raskin di Desa Banguntapan Bantul benar-benar sudah tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Jumlah Beras Raskin

Raskin yang diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat harus tepat jumlah. Tepat jumlah artinya jumlah raskin yang diterima harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima Raskin dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga. Untuk mengetahui apakah pendistribusian Raskin desa Banguntapan Bantul udah tepat jumlah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan dengan salah seorang penerima Raskin diperoleh jawaban:

“Jumlah beras yang dibeli dari raskin adalah 15 kg sedangkan jumlah keluarga saya 6 sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup saya dan hanya cukup untuk 10 hari, harapan saya ditambah jumlahnya”. (Wawancara dengan Bapak. Samiran Tanggal 4 Febuari 2011)

Dari pernyataan pernyataan diatas terlihat bahwa jumlah beras yang dibeil dari Raskin adalah 15 kg dan belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sebulan dengan jumlah anggota keluarga 6 hanya cukup untuk makan 10 hari. untuk mencukupi kebutuhan makan sampai 1 bulan masyarakat harus membeli beras dipasar dengan harga yang sangat tinggi bagi mereka bahkan

ada sebagian harus mengutang ke warung terdekat. Untuk saat ini masyarakat miskin di desa Banguntapan Bantul sangat membutuhkan Raskin karena dengan kondisi perekonomian yang belum membaik mereka sangat kesulitan memenuhi kebutuhan makan keluarga sehari-hari.

Lebih lanjut salah seorang penerima Raskin diperoleh jawaban bahwa:

“Saya membeli beras dari Raskin adalah 15 kg, jumlah keluarga saya 4, beras yang saya terima hanya cukup untuk makan dua minggu, saya berharap ditambah jumlahnya”.
(Wawancara dengan Ibu Martinah tanggal 7 febuari 2011)

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa jumlah beras yang dibeli dari Raskin adalah 15 kg dan belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sebulan dengan jumlah anggota keluarga 4 hanya cukup untuk makan dua minggu. Sehingga bagi keluarga miskin sangat mengharapkan penambahan jumlah jatah raskin sesuai dengan kebutuhan hidup mereka selama satu bulan.

Lebih lanjut salah seorang petugas pelaksana Raskin yaitu menyampaikan sebagai berikut:

“Beras Raskin sesuai hasil musyawarah tim Raskin daerah minimal 15 kg/kk/bulan dan maksimal 20 kg/kk bulan tetapi dalam prakteknya di desa Banguntapan Bantul dibagikan 15 kg/kk/bulan dan bahkan setiap kk menerima 10 kg ini di krenakan jumlah beras yang masuk ke titik distribusi kurang.”
(wawancara dengan Ibu Eni Susilowati tanggal 7 Febuari 2011).

Dari pernyataan dengan aparat pelaksana Raskin tersebut dapat terlihat bahwa Raskin sesuai hasil musyawarah tim Raskin daerah minimal 15 kg/kk/bulan dan maksimal 20 kg/kk/bulan tetapi dalam prakteknya di desa Banguntapan Bantul dibagikan 15 kg/kk/bulan dan bahkan 10 kg yang di sebabkan jumlah beras yang masuk di titik distribusi tidak sesuai jumlah kk yang menerima.. Dengan adanya pemerataan tersebut dapat mengatasi kecemburuan sosial yang ada di masyarakat. Sebab jika pembagian besar Raskin tidak merata kepada seluruh keluarga miskin di desa Banguntapan Bantul akan terjadi gejala sosial yang berdampak pada masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Banguntapan Bantul sudah tepat jumlah sesuai ketentuan yang berlaku tetapi belum mencukupi kebutuhan makan masyarakat miskin.

3. Harga Beras Raskin

Harga beras Raskin yang diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat tepat harga. Untuk mengetahui apakah pendistribusian Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah tepat harga dapat dilihat pernyataan dengan salah seorang penerima Raskin sebagai berikut :

“Untuk memperoleh beras Raskin saya bayar Rp. 1.750 untuk setiap Kg, menurut Pak. RT dan pak dukuh itu memang sudah ditetapkan karena menutupi biaya operasional, ” (Wawancara dengan Ibu Sinin Tanggal 6 Febuari 2011).

Harga beras Raskin yang harus dibayar masyarakat penerima adalah Rp. 1.750-untuk setiap Kg. Hal tersebut bukan harga yang sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa seluruh penerima raskin membayar Rp. 1600,- untuk setiap kg. karena biaya operasional pengangkutan dari kelurahan ke titik pendistribusian, harga di naik sekitar Rp.170,- untuk menutupi biaya angkut. Lebih lanjut berdasarkan pernyataan dengan salah seorang penerima raskin diperoleh jawaban bahwa:

“Harga beras yang saya bayar Rp. 1750,-/kg, jadi kalau 15 kg yang dibayar sebanyak Rp 26.250,-, menurut saya harga tersebut tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau”.
(wawancara dengan Ibu Suwito 7 Febuari 2011)”

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa harga beras yang dibayar penerima Raskin adalah Rp 17500,-/kg, jadi 15 kg yang dibayar Rp 24.250,- dan harga tersebut tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kabag Kesra Desa Banguntapan Bantul menyampaikan bahwa:

“Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harga beras yang harus dibayar oleh masyarakat penerima Raskin adalah Rp1600/kg. Jadi karena mereka menerima 15 kg maka mereka membayar Rp 16.000,-“.tapi kalo masuk di titik pendistribusian harganya di tambah sekitar Rp. 150 karena biaya operasional (Wawancara dengan bapak Sudarmadji tanggal 7 Febuari 2011).

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harga beras yang harus dibayar oleh masyarakat penerima Raskin adalah Rp 1750/kg. Jadi 15 kg beras membayar Rp 26.250,-“. Bagi warga masyarakat penerima Raskin

harga tersebut tidak memberatkan dan masih bisa dijangkau oleh masyarakat penerima Raskin di desa Banguntapan Bantul. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Raskin di Desa Banguntapan Bantul tidak tepat harga yaitu Rp 1750,- setiap Kg. karena harus membayar sekitar Rp.150 untuk biaya operasional pengangkutan dari kelurahan ke titik pendistribusian.

4. Waktu Pelaksanaan Program Raskin

Raskin harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat tepat waktu. Untuk mengetahui apakah pendistribusian Raskin di desa Banguntapan Bantul tepat waktu dapat dilihat dari wawancara dengan salah seorang penerima Raskin diperoleh jawaban bahwa :

“Waktu pemberian Raskin biasanya tepat waktu yaitu setiap awal bulan, pernah terlambat pada bulan November sampai pertengahan bulan Desember” (wawancara dengan Ibu Mujiran tanggal 7 Februari 2011).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu pemberian Raskin biasanya tepat waktu yaitu setiap awal bulan Januari sampai pertengahan bulan karena pada waktu itu pergantian tahun baru. Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

“Penerima Raskin di desa Banguntapan Bantul ini tidak selalu tepat waktu, terkadang awal bulan bahkan pertengahan bulan diterima oleh pemerintah desa dan langsung didistribusikan kepada penerima manfaat beras Raskin oleh aparat yang menangani Raskin di Desa Banguntapan Bantul bahkan untuk mempercepat waktu masing-masing dukuh menyediakan transportasi sendiri untuk mengambil beras dari balai desa karena dari Kabupaten titik distribusinya hanya sampai tingkat

desa”. (wawancara dengan Bapak, Bahkrun Tanggal 7 Februari 2011)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pemberian Raskin di Desa Banguntapan Bantul tidak tepat waktu yaitu diterima oleh pemerintah Desa setiap awal bulan dan pertengahan bulan langsung di distribusikan kepada penerima manfaat beras Raskin melalui dukuh dan RT masing-masing. Lebih lanjut salah seorang petugas Raskin menyampaikan sebagai berikut:

“Raskin di Desa Banguntapan Bantul Terima oleh Pemerintah Desa setiap awal bulan dan pertengahan bulan, kemudian beras langsung didistribusikan kepada penerima manfaat beras Raskin oleh aparat yang menangani Raskin desa Banguntapan Bantul melalui ketua RT masing-masing” (wawancara dengan Bapak Dwiaris Anggoro Tanggal 7 febuari 2011).

Dapat disimpulkan bahwa waktu pemberian Raskin di desa Banguntapan Bantul setiap awal bulan dan langsung di distribusikan kepada penerima manfaat Raskin melalui dukuh dan RT masing-masing. Dengan ketetapan waktu tersebut sangat membantu bagi warga masyarakat penerima Raskin dalam memenuhi kebutuhan makan sehingga setiap awal bulan sudah dipastikan mereka dapat menerima beras Raskin.

5. Administrasi Pelaksanaan Program Raskin

Tepat administrasi artinya terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Untuk memenuhi tepat administrasi dalam pelaksanaan program Raskin ini adalah sebagai berikut.

- a. Pendataan RTM (rumah tangga miskin) yang berhak menerima beras Raskin. Dalam pendataan RTM penerima manfaat beras miskin ini melalui musyawarah desa/kelurahan sesuai dengan data BPS, musyawarah ini yang dipimpin kepala desa/lurah, dihadiri oleh perangkat desa/kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, RW, RT, tokoh masyarakat dan tokoh Agama untuk mendapatkan kesepakatan tentang daftar nama RTM yang menerima Raskin, dan kemudian data-data nama RTM tersebut di lampirkan dalam surat penentuan penerima Raskin yang di tanda tangani oleh kepala desa/kelurahan dan kepala bagain kesejahteraan masyarakat. Daftar nama RTM penerima Raskin di temple di papan pengumuman desa/kelurahan. Dan dilaporkan secara berjenjang kepada kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
- b. Pemberian kartu Raskin dari Bulog kepada penerima manfaat kepala rumah tangga miskin yang di tanda tangani oleh tim kordinasi Raskin kabupaten/kota Bantul. Yang di bagikan secara langsung oleh bagain kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahan.
- c. Tanda terima pada saat pemberian beras Raskin kepada masyarakat penerima

Raskin harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat tepat administrasi. Untuk mengetahui apakah pendistribusian Raskin di

desa Banguntapan Bantul sudah tepat administrasi dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan pernyataan salah seorang penerima Raskin diperoleh jawaban bahwa :

“Untuk membeli beras Raskin saya memperoleh kartu anggota Raskin yang harus saya bawa waktu membeli Raskin, karena kartu tersebut ditanyakan oleh petugas Raskin, petugas memberikan beras Raskin ada tanda terimanya”. (wawancara dengan Ibu Daliyem tanggal 8 febuari 2011).

Untuk membeli Raskin masyarakat penerima Raskin memperoleh kartu anggota Raskin yang harus dibawa setiap membeli Raskin, kartu tersebut ditanyakan oleh petugas Raskin. Selain membawa kartu Raskin masyarakat penerima Raskin harus menandatangani berkas sebagai tanda penerimaan beras Raskin.

Lebih lanjut kepala Desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Penerima Raskin terlebih dahulu didata oleh petugas yang kemudian masing-masing masyarakat miskin yang berhak menerima Raskin diberikan kartu anggota Raskin, waktu pengambilan beras Raskin kartu Raskin harus dibawa karena selalu ditanyakan oleh petugas. Waktu penyerahan beras Raskin dari aparat kepada warga masyarakat penerima Raskin selalu disertai tanda terima” (wawancara dengan Bapak Sriyanto tanggal 7 febuari 2011)

Penerima Raskin terlebih dahulu didata oleh petugas yang kemudian masing-masing masyarakat miskin yang berhak menerima

Raskin diberikan kartu anggota Raskin, waktu pengambilan beras Raskin kartu Raskin harus dibawa karena selalu ditanyakan oleh petugas. Waktu penyerahan beras Raskin dari aparat kepada warga masyarakat penerima Raskin selalu disertai tanda terima. Dengan adanya kartu anggota dan tanda terima tersebut akan dapat memperlancar proses distribusi dan dapat dihindari penyelewengan beras Raskin baik oleh masyarakat maupun oleh petugas yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian beras Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah tepat administrasi yang meliputi pendataan masyarakat yang berhak menerima beras Raskin, pemberian kartu anggota bagi masyarakat miskin penerima Raskin dan adanya tanda terima pada saat pemberian beras Raskin kepada masyarakat penerima.

6. Kualitas Beras Program Raskin

Tepat kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui apakah pendistribusian Raskin di Desa Banguntapan Bantul sudah tepat kualitas dapat dilihat pada hasil

wawancara dengan beberapa informan. Salah seorang tokoh masyarakat di desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut :

“Tentang kualitas berasnya mas, saya secara pribadi menilai memang kurang bagus, warnanya tidak putih bersih tetapi agak kekuning kuningan dan baunya agak apek, walaupun tetap dimasak oleh sebagian penerima raskin tetap rasanya tidak enak” (wawancara dengan Bapak bahkrun tanggal 7 febuari 2011)

Kualitas beras Raskin kurang bagus, warnanya tidak putih bersih tetapi agak kekuning kuningan dan baunya agak apek sehingga rasanya tidak enak jika dimasak.

Lebih lanjut salah seorang masyarakat penerima Raskin di desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau saya ya tidak sampai hati pak, sebab berasnya jelek, dan setiap menerima jatah Raskin saya tukarkan dulu ke pedagang dengan beras yang bagus, baru dimasak” (wawancara dengan Ibu Hartowiyono tanggal 8 Febuari 2011)

Kualitas beras Raskin warnanya kekuning kuningan sehingga sebagian masyarakat penerima Raskin tidak sampai hati untuk memasaknya sehingga harus ditukarkan dulu kepada pedagang dengan beras yang lebih enak. Beras raskin yang diperoleh pedagang dari masyarakat penerima Raskin kemudian dijual kembali untuk dijadikan tepung beras.

Masyarakat penerima Raskin di desa Banguntapan Bantul yang lain menyampaikan sebagai berikut:

“Beras yang saya terima juga saya masak mas, tetapi hanya untuk campuran sedikit-sedikit saja sebab berasnya memang tidak bagus dan kalau tiak dicampuri kok ya tidak sampai hati”. (Bapak Samijo tanggal 7 febuari 2011)

Kualitas beras program Raskin di desa Banguntapan Bantul tidak tepat kualitas karena beras yang dibagikan mutunya jauh dari yang ada di pasaran sehingga masyarakat ada yang menjualnya, walaupun ada yang memasak hanya untuk campuran saja.

Salah seorang aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya mas, kualitas Raskin memang tidak sebaik dengan kualitas beras yang dijual di pasaran-pasaran umum”. (Bapak Aris Anggoro, 8 febuari 2010)

Kualitas beras Raskin kurang bagus dan tidak sebaik dengan kualitas beras yang dijual di pasaran-pasaran umum sehingga memang belum layak konsumsi bagi masyarakat.

Secara umum program Raskin ini belum dan bahkan tidak berhasil, sebab tidak begitu banyak perubahan yang terjadi khususnya kelompok sasaran penerima manfaat disamping karena jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mutunya juga jauh jika dibanding beras yang ada di pasaran pada umumnya, sehingga banyak beras Raskin yang tidak dikonsumsi tetapi malah dijual karena kualitasnya yang jauh dari standard.

2.2. Sumber Daya Manusia

Implementasi program akan berhasil apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Tentang sumber daya manusia pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di desa Banguntapan Bantul, Propinis DIY dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa informan. Tentang jumlah aparat yang memadai dalam pelaksanaan raskin di desa Banguntapan bantul salah seorang aparat pelaksana raskin menyampaikan sebagai berikut;

“Jumlah aparat pelaksana raskin di Desa Banguntapan Bantul ini terdiri dari Kades dan dibantu pak Sekdes dan semua dukuh. Pelaksanaan di lapangan saat pembagian raskin dibantu oleh ketua-ketua RT dan masyarakat yang mau menjadi relawan. Jumlah tersebut sebenarnya bagi saya yasudah memadai”. (wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 8 febuari 2011).

Jumlah aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul ini terdiri dari Kades dan dibantu pak Sekdes dan semua dukuh. Pelaksanaan di lapangan saat pembagian raskin dibantu oleh ketua-ketua RT. Jumlah tersebut sebenarnya sudah memadai karena selama ini terbukti dalam setiap pendistribusian Raskin tidak pernah menghadapi kendala yang berarti.

Aparat pelaksana Raskin yang lain meyampaikan sebagai berikut:

“Aparat pelaksana Raskin di Desa Banguntapan Bantul sudah cukup mas!, pak kepala desa, Pak sekretaris desa dan dibantu oleh semua dukuh. Untuk aparat pelaksana raskin dilihat dari

kualitasnya mempunyai kemampuan yang cukup memadai”. (Ibu Sulistyowati tanggal 9 Februari 2011).

Jumlah aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah cukup. Jika dilihat dari kualitasnya aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul mempunyai kemampuan yang cukup memadai mengingat tugas dan tanggung jawab aparat pelaksana Raskin tidak terlalu berat sehingga para aparat Raskin sudah mampu dan terbiasa dengan pekerjaan tersebut.

Lebih lanjut salah seorang tokoh masyarakat di desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, ya memang jumlahnya sudah memadai tetapi semua aktif terlibat, sebab yang terlibat dalam pelaksana program Raskin ini hanya Pak Kades, Pak Sekdes dan 11 (sebelas) orang Dukuh, sedangkan aparat yang lain tidak aktif, sedangkan pada saat pembagian ke penerima Raskin, dibantu oleh ketua-ketua RT”. (Bapak Yuliantoro tanggal 12 Februari 2011)

Dari pernyataan dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa program Raskin di Desa Banguntapan Bantul secara kuantitas sudah tersedia sumber daya manusia yang memadai.

Tentang kemampuan aparat pelaksana implementasi program Raskin di Desa Banguntapan Bantul salah seorang aparat pelaksana Raskin menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya semua aparat pelaksana cukup mampu, cuman tingkat kesregepannya ada yang sregap ada yang kurang,

maklum karakternya memang berbeda-beda. Secara umum aparat pelaksana raskin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik”. (wawancara dengan Ibu Endang Suryani tanggal 8 Febuari 2011)

Aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan bantul sudah cukup mampu tetapi tingkat kerajinan mereka berbeda-beda, ada yang rajin ada yang kurang, karena karakter masing-masing orang berbeda-beda. Secara umum aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul mampu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa mengalami kendala yang berarti.

Salah sorang tokoh masyarakat di Desa Banguntapan bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Semua aparat pelaksana saya lihat cukup mampu dan memadai, karena bagi saya program raskin inikan rutinitas, setiap bulan pasti melaksanakan dan aturan-aturannya sama, kalau ada perubahan hanya sedikit saja”. (awancara dengan Bapak Hatono tanggal 8 Faebuari 2011)

Kemampuan aparat pelaksana program Raskin di desa Banguntapan Bantul secara umum sudah memadai karena program Raskin merupakan program rutinitas sehingga tidak memerlukan keahlian khusus.

Salah seorang masyarakat penerima beras Raskin di Desa Banguntapan bantul menyampaikan sebagai berikut;

“Aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul mampu melaksanakan tugasnya dengan baik terbukti selama ini kami selalu dilayani dengan baik dan tidak pernah ada masalah”. (Bapak Hartono tanggal 8 Febuari 2010)

Kemampuan aparat pelaksana program Raskin di Desa Banguntapan Bantul sudah baik terbukti dapat melayani masyarakat penerima Raskin dengan baik dan tidak pernah ada masalah yang berarti.

Kualitas sumber daya manusia pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul secara kualitas maupun kuantitas sudah memadai. Hal tersebut terbukti bahwa dalam pelaksanaan Raskin di desa Banguntapan Bantul dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. Selain aparat pelaksana Raskin dalam pendistribusian beras Raskin kepada masyarakat penerima Raskin di desa Banguntapan Bantul selalu dibantu oleh para pengurus RT. Pekerjaan pendistribusian Raskin adalah rutinitas sehingga para aparat sudah dapat melaksanakan dengan baik.

2.3. Sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal dalam koordinasi antar instansi yang berkaitan di Desa Banguntapan

Sosialisasi adalah aspek penting dalam keberhasilan berjalannya program Raskin ini. Implementasi program Raskin ini tidak akan berhasil jika tanpa adanya sosialisasi dalam Organisasi (internal) maupun (eksternal) dalam pelaksanaan, sehingga koordinasi antara instansi yang terkait bisa berjalan dengan baik berhubungan dengan program Raskin ini. Tujuan Sosialisasi ini adalah menyebarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan

penyaluran beras ke titik pendistribusian dan RTM (rumah tangga miskin) dari pernyataan yang dilakukan nara sumber menyampaikan bahwa

“untuk masalah sosialisasi ini jarang dilaksanakan karena kegiatan ini sudah cukup lama dan saya rasa masyarakat sudah tau, cukup dukuh saja yang mengkoordinasikan langsung kepada masyarakat dalam penyaluran dari tingkat desa ke titik pendistribusian” Bpk. Sudarmadji. 8 Febuari 2011.

Dalam hal ini di harapkan dari berbagai pihak aparat dapat mensosialisasi kan kegiatan ini dengan baik, akan tetapi jika di lihat dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan aparat pelaksana suda terbisa dengan kegiatan ini tanpa di lakukan sosialisasi pun kegiatan pembagaian raskin berjalan dengan baik. pelaksana Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di desa Banguntapan Bantul, Propinsi DIY dapat dilihat dari pernyataan dengan beberapa informan. Tentang pemahaman seluruh aparat pelaksana Program Raskin terhadap informas tentang program Raskin salah seorang aparat pelaksana menyampaikan sebagai berikut:

“Saya menilai bahwa semua aparat pelaksana program Raskin disini telah memahami informasi tentang program Raskin karena program Raskin ini sudah ada sejak tahun 2002 dulu”.
(Bapak Dwi Aris Anggoro tanggal 8 Febuari 2011)

Semua aparat pelaksana program Raskin di desa Banguntapan Bantul memahami infomasi tentang program Raskin karena program Raskin ini sudah ada sejak tahun 2002 jika ada informasi baru biasanya tidak terlalu

banyak perubahan sehingga aparat pelaksana Raskin dapat dengan cepat menerima dan memahaminya.

Lebih lanjut salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

“Sebenarnya seluruh aparat pelaksana program Raskin di Desa Banguntapan Bantul ini telah paham terhadap tujuan program Raskin. Tujuan Raskin untuk membantu KK yang memang benar-benar miskin”. (Bapak Ngatijan tanggal 8 Januari 2011)

Seluruh aparat pelaksana program Raskin di Desa Banguntapan bantul telah paham terhadap tujuan program Raskin yaitu Tujuan Program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan pemenuahn sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.

Tentang pemahaman seluruh aparat pelaksana Program Raskin di desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Di depan tadi sudah saya katakan bahwa tingkat kesergapan dan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing memang tidak sama. Saya yakin seluruh aparat pelaksana sudah paham terhadap tanggung jawabnya masing-masing, tetapi dalam melaksanakan tugasnya ada yang sungguh-sungguh dan ada yang hanya sekedar membantu saja”. (Ibu Sriyanto tanggal 8 febuari 2011)

Seluruh aparat pelaksana program Raskin di Desa Banguntapan Bantul telah memahami terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Lebih lanjut tentang pemahaman seluruh aparat pelaksana program Raskin di Desa Banguntapan Bantul terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing salah seorang tokoh masyarakat di Desa Banguntapan Bantul menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya seluruh aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah paham terhadap tanggung jawabnya masing-masing, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap aparat pelaksana Raskin di desa Banguntapan Bantul”. (Bapak Rudi Hartono tanggal 8 Februari 2011)

Aparat pelaksana Program Raskin di desa Banguntapan Bantul telah memahami terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tentang keselarasan tindakan antar organisasi pelaksana Program Raskin di Desa Banguntapan Bantul salah seorang aparat pelaksana Raskin menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya sudah selaras, begitu Raskin turun di Kantor Kepala Desa, kepala Desa dan aparat pelaksana yang lain mengadakan koordinasi. Walaupun kadang juga tidak semuanya hadir. Kemudian hasil koordinasi disampaikan kepada masing-masing Ketua RT lewat Dukuh yang membawahi wilayahnya masing-masing”. (Bapak Sudarmaji tanggal 8 Februari 2011)

Secara umum telah terjadi keselarasan tindakan antar organisasi pelaksana Program Raskin di Desa Banguntapan Bantul.

Lebih lanjut tentang keselarasan tindakan antar organisasi pelaksana Program Raskin di desa Banguntapan Bantul salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya telah terjadi keselarasan tindakan antar organisasi pelaksana program Raskin di desa Banguntapan Bantul sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti”. (Bapak Sudarmaji tanggal 8 Februari 2011)

Telah terjadi keselarasan tindakan antar organisasi pelaksana program Raskin di desa Banguntapan sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.

Tentang kejelasan informasi Program Raskin di desa Banguntapan Bantul salah seorang aparat pelaksana Raskin menyampaikan sebagai berikut:

“Saya mengetahui program Raskin informasi awalnya dari Bapak Kepala Desa karena pak Kades yang sering mengikuti rapat koordinasi di kecamatan disamping lewat sosialisasi-sosialisasi dari kecamatan juga sudah ada buku pedomannya dari pemerintah”. (ibu Eni Susiowati tanggal 8 Februari 2011)

Informasi Program Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah jelas karena sering dilakukan sosialisasi dan ada buku panduan Raskin yang setiap tahun diterbitkan.

Tentang pemahaman kelompok sasaran penerima manfaat terhadap Program Raskin di desa Banguntapan Bantul salah seorang aparat pelaksana menyampaikan sebagai berikut:

“Pada umumnya rumah tangga itu sudah tahu dan paham tentang program Raskin, walaupun ada juga yang tidak pernah mengikuti sosialisasi ditingkat desa, tetapi dari tetangga-tetangga dekat mereka”. (Bapak Sudarmaji tanggal 7 Febuari 2011)

Pada umumnya rumah tangga miskin di desa Bnaguntapan Bnatul sudah tahu dan paham tentang porgram raskin, walaupun ada juga yang tidak pernah mangikuti sosialisasi di tingkat desa, tetapi dari tetangga-tetangga dekat mereka memperoleh informasi.

Lebih lanjut salah seorang warga masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

“Saya tahu dan paham terhadap program raskin dari pak RT dan pak Kadss yang sering narik dan meminta pajak kesini dan tetangga-tetangga juga sering membicarakan program raskin”. (Bapak Barimin tanggal 9 Febuari 2011)

Kelompok sasaran penerima manfaat terhadap Program Raskin di desa Banguntapan Bantul sudah memahami terhadap program Raskin, mereka memperoleh informasi dari sosialisasi, informasi dari perangkat desa dan dari tetangga.

Dari pernyataan dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pelaksanaan program Raskin di Desa Banguntapan bantul secara umum sudah memadai dan dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pelaksanaan indikator-indikator kinerja program dalam Implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Banguntapan sebagai berikut:

- 1) Jumlah beras yang diterima oleh setiap kepala keluarga penerima manfaat Raskin tidak tepat jumlah karena jumlah beras yang masuk di titik distribusi tidak sesuai dengan jumlah kepala keluarga penerima manfaat yang terdaftar sesuai hasil musyawarah tim Raskin daerah.
- 2) Harga beras yang harus dibayar oleh setiap KK penerima manfaat Raskin adalah, Rp. 1.600 /Kg, tetapi di titik pendistribusian harus membayar dengan harga Rp. 1.750/Kg, atau menambah pembayaran sebesar Rp.150 untuk menutupi biaya oprasional pengangkutan dari kelurahan ke titik pendistribusian raskin, sehingga harga beras tidak tepat harga.
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai standar kualitas beras Bulog.yang menyebabkan kegunaan beras Raskin tidak memenuhi kebutuhan masyarakat degan baik Dengan mutunya jauh dari yang ada di pasaran sehingga masyarakat ada yang menjualnya, walaupun ada yang memasak hanya untuk campuran saja.

sosialisasi internal (pelaksana/aparat desa), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), dalam koordinasi antara instansi terkait di Desa Banguntapan antara lain:

1. Dapat diharapkan dari berbagai pihak aparat mensosialisasi kan kegiatan ini dengan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar, akan tetapi jika di lihat dari hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan aparat pelaksana suda terbiasa dengan kegiatan ini sehingga minimnya sosialisasi yang di lakukan aparat pelaksanaan Raskin, yang menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan lancar dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan
2. Kurang adanya penggunaan media seperti media massa untuk mensosialisasi program Raskin lebih efektif untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat untuk memperoleh informasi tentang Program Raskin serta hak dan kewajiban masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan kesimpulan yang di ambil, maka peneliti akan mencoba untuk memberikan saran-saran guna peningkatan keberhasilan program Raskin yang antara lain meliputi :

1. Program Raskin sebaiknya diarahkan untuk membuat masyarakat miskin menjadi mandiri, dan bukan lagi sebagai program darurat (*emergency program*) dan karitatif semata, melainkan merupakan program yang terencana dan terkoordinasi antar pusat dan daerah menuju ketahanan pangan nasional. Atau dengan kata lain, program, Raskin diharapkan dapat dikembangkan menjadi program kesejahteraan sosial (*social welfare program*).
2. Masih diperlukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima beras Raskin sehingga seluruh keluarga miskin di desa Banguntapan bantul dapat memperoleh jatah beras Raskin.
3. Secara umum kebijakan Raskin yang sudah berjalan hampir lima tahun ini perlu dievaluasi, dana yang tersedia akan lebih baik jika dialokasikan untuk program lain yang lebih memberdayakan masyarakat.
4. Untuk menunjang kegiatan program Raskin sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif seperti; rapat kordinasi, media masa, dan media lainnya yang dapat menjangkau masyarakat untuk informasi-informasi Raskin di Desa Banguntapan.